Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 292 - 305
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Demokrasi/article/view/509
E-ISSN: 3163-7582

Peran WFP dalam Krisis Pangan Ethiopia 2020–2022

Shefti Claudia Agatha Riris Nainggolan[1], Adil Arifin[2]
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia [1,2]
Corresponding Author: *sefticlaudia1009@gmail.com[1*], adil.arifin@usu.ac.id[2]*

Info Artikel
Received: *08 September 2026*
Revised : *16 September 2026*
Accepted: *27 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *World Food Programme, food crisis, international organization, Ethiopia, humanitarian aid.*

Abstract
Ethiopia's food crisis in 2020–2022 arose from the interaction of armed conflict, prolonged drought, the COVID-19 pandemic, market disruption, and declining purchasing power. Existing discussions often describe World Food Programme activities without explaining how its institutional position shaped the response. This qualitative library study analyzes official World Food Programme reports, United Nations documents, Integrated Food Security Phase Classification data, policy documents, and scholarly articles through Clive Archer's conception of international organizations as instruments, arenas, and independent actors. The findings show that the World Food Programme translated voluntary donor funding into food, cash, nutrition, and logistics assistance; provided coordination forums that connected the Ethiopian government, United Nations agencies, donors, and non-governmental organizations; and exercised relative autonomy through needs assessment, targeting, modality selection, and supply-chain management. It reached 3.91 million beneficiaries in 2020, 9.83 million in 2021, and approximately 10.2 million in 2022. However, donor earmarking, access restrictions, security risks, and state sovereignty limited that autonomy. The organization therefore operated as a multidimensional actor whose emergency contribution was substantial but insufficient to resolve Ethiopia's structural food insecurity.

Kata Kunci*:* World Food Programme, krisis pangan, organisasi internasional, Ethiopia, bantuan kemanusiaan.

Abstrak
Krisis pangan Ethiopia pada 2020–2022 terbentuk dari interaksi konflik bersenjata, kekeringan berkepanjangan, pandemi COVID-19, gangguan pasar, dan penurunan daya beli. Kajian tentang World Food Programme umumnya berhenti pada uraian program, belum menjelaskan bagaimana posisi kelembagaan organisasi membentuk responsnya. Penelitian kepustakaan kualitatif ini menganalisis laporan resmi World Food Programme, dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa, data Integrated Food Security Phase Classification, dokumen kebijakan, dan artikel ilmiah dengan kerangka Clive Archer mengenai organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Hasil menunjukkan bahwa World Food Programme mengubah pendanaan sukarela donor menjadi bantuan pangan, tunai, gizi, dan logistik; menyediakan forum koordinasi bagi pemerintah Ethiopia, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa, donor, dan organisasi nonpemerintah; serta menjalankan otonomi relatif melalui asesmen kebutuhan, penargetan, pemilihan modalitas, dan pengelolaan rantai pasok. Organisasi ini menjangkau 3,91 juta penerima pada 2020, 9,83 juta pada 2021, dan sekitar 10,2 juta pada 2022. Namun, penandaan dana donor, pembatasan akses, risiko keamanan, dan kedaulatan negara membatasi otonominya. Dengan demikian, World Food Programme berperan

multidimensional, tetapi respons daruratnya belum menyelesaikan kerawanan pangan struktural Ethiopia.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Krisis pangan Ethiopia pada 2020–2022 tidak dapat dijelaskan sebagai kekurangan produksi semata. Konflik di Tigray memutus jalur distribusi dan merusak mata pencaharian, kekeringan berulang menekan produksi tanaman dan ternak, pandemi COVID-19 mengganggu pasar, sementara inflasi melemahkan kemampuan rumah tangga membeli pangan. Kombinasi itu bekerja serentak pada ketersediaan, akses, dan stabilitas pangan. Analisis IPC memperlihatkan memburuknya kerawanan pangan akut pada wilayah yang juga menghadapi konflik dan gangguan pasar (Hakiki, 2020; Integrated Food Security Phase Classification, 2021). Karena itu, persoalannya bukan hanya berapa banyak makanan tersedia, melainkan siapa yang dapat memperolehnya, melalui jalur apa, dan seberapa stabil akses tersebut ketika guncangan datang berulang. (Abay et al., 2022; Weldegiargis et al., 2023).

Pandemi menambah tekanan pada sistem pangan yang telah rapuh. Di Addis Ababa, perubahan pendapatan dan mobilitas memengaruhi konsumsi rumah tangga, sedangkan gangguan rantai nilai sayuran menaikkan biaya pemasaran dan harga konsumen (Hirvonen, de Brauw, et al., 2021; Hirvonen, Minten, et al., 2021). Pada saat yang sama, gangguan layanan pangan dan gizi mengurangi kemampuan institusi publik menjangkau kelompok rentan (McCann et al., 2023). Di wilayah utara, konflik memperbesar risiko malnutrisi akut pada anak dan menghambat layanan kesehatan serta distribusi bantuan (Mulugeta & Gebregziabher, 2022). Rangkaian bukti tersebut menunjukkan bahwa respons kemanusiaan harus menghubungkan bantuan pangan, gizi, logistik, analisis pasar, dan negosiasi akses.

World Food Programme (WFP) menjadi aktor penting karena memiliki mandat bantuan pangan sekaligus kapasitas logistik berskala besar. Namun, membaca WFP hanya sebagai distributor komoditas menghasilkan analisis yang dangkal. Daftar program memang memperlihatkan keluasan aktivitas, tetapi tidak menjelaskan mengapa organisasi dapat mengoordinasikan aktor, menetapkan prioritas teknis, dan pada saat bersamaan tetap bergantung pada donor serta persetujuan negara tuan rumah. Kajian sebelumnya menegaskan fungsi WFP dalam negara berkonflik, tetapi hubungan antara struktur kelembagaan dan pilihan operasional masih perlu dijelaskan secara lebih sistematis (Rumbia et al., 2022). Kerangka Clive Archer membedakan tiga posisi organisasi internasional. Pertama,

organisasi dapat menjadi instrumen yang digunakan negara anggota untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, organisasi menjadi arena tempat aktor berunding, bertukar informasi, dan menyelaraskan tindakan. Ketiga, organisasi dapat bertindak sebagai aktor independen yang memiliki birokrasi, pengetahuan, aturan, dan kapasitas untuk menentukan tindakan sendiri (Archer, 2001). Ketiga posisi itu tidak saling meniadakan. Satu organisasi dapat menjalankan semuanya secara bersamaan, dengan derajat otonomi yang berubah sesuai pendanaan, legitimasi, akses, dan kondisi politik.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan: bagaimana WFP menjalankan perannya sebagai organisasi internasional dalam menangani krisis pangan Ethiopia selama 2020–2022. Artikel ini bertujuan menjelaskan WFP sebagai instrumen, arena, dan aktor yang relatif independen, serta menilai hasil kemanusiaan dan batas institusional dari ketiga peran tersebut. Kontribusinya terletak pada pergeseran fokus dari inventarisasi kegiatan menuju analisis posisi kelembagaan. Dengan cara itu, capaian distribusi dibaca bukan sebagai angka yang berdiri sendiri, tetapi sebagai keluaran dari hubungan donor, negara tuan rumah, birokrasi WFP, dan jaringan kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Unit analisisnya adalah peran kelembagaan WFP dalam respons krisis pangan Ethiopia pada 2020–2022. Bahan penelitian berasal dari laporan tahunan negara WFP, Ethiopia Country Strategic Plan 2020–2025, Humanitarian Response Plan, laporan IPC, dokumen FAO, UNICEF, dan UNHCR, serta artikel ilmiah yang tercantum dalam naskah sumber. Pemilihan dokumen didasarkan pada tiga kriteria: relevan langsung dengan Ethiopia dan periode penelitian, memuat informasi tentang keputusan atau pelaksanaan program, serta memungkinkan pemeriksaan sumber dan tahun penerbitan.

Analisis dilakukan melalui pembacaan tematik. Informasi terlebih dahulu dikelompokkan ke dalam konteks krisis, sumber daya dan program WFP, mekanisme koordinasi, keputusan operasional, hasil kemanusiaan, serta kendala pelaksanaan. Tema tersebut kemudian dipetakan ke tiga kategori Archer, yaitu instrumen, arena, dan aktor independen. Kategori instrumen digunakan ketika bukti memperlihatkan aliran mandat atau sumber daya dari donor dan sistem PBB ke operasi WFP. Kategori arena digunakan ketika WFP menyediakan struktur koordinasi dan perundingan. Kategori aktor independen digunakan ketika WFP menetapkan asesmen, target, modalitas, dan desain operasi berdasarkan mandat serta keahlian organisasionalnya.

Keabsahan interpretasi dijaga melalui triangulasi sumber. Angka penerima dan volume bantuan

diutamakan dari laporan tahunan WFP, sedangkan konteks kebutuhan diperiksa melalui IPC dan rencana kemanusiaan. Klaim tentang koordinasi dibandingkan dengan dokumen lembaga mitra, sementara analisis pendanaan dan diplomasi didukung artikel ilmiah. Pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk mengukur dampak kausal program terhadap status pangan rumah tangga. Temuan menjelaskan peran kelembagaan dan capaian operasional berdasarkan dokumen yang tersedia, sehingga kesimpulan tentang efektivitas dibatasi pada kontribusi respons, jangkauan, dan kendala yang dapat diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Krisis Pangan Ethiopia 2020–2022

Krisis berkembang melalui tumpang tindih guncangan. Konflik Tigray yang dimulai pada akhir 2020 memicu perpindahan penduduk, menutup pasar, menghambat musim tanam, dan membuat koridor bantuan bergantung pada situasi keamanan. Kekeringan multi-musim di Tanduk Afrika memperkecil panen, mengurangi ketersediaan air, dan menyebabkan kematian ternak. Kajian klimatologi mengaitkan kekeringan tersebut dengan rangkaian La Niña dan kegagalan hujan pada beberapa musim (Anderson et al., 2023). Pandemi dan tekanan harga global kemudian memperbesar biaya pangan serta transportasi. Akibatnya, rumah tangga kehilangan produksi sendiri sekaligus daya beli.

Pada dimensi ketersediaan, produksi lokal dan stok rumah tangga turun akibat konflik, kekeringan, dan kerusakan aset. Pada dimensi akses, gangguan pasar, kehilangan pendapatan, inflasi, dan pembatasan mobilitas membuat pangan yang tersedia tidak selalu dapat dibeli atau dijangkau. Pada dimensi stabilitas, perubahan keamanan dan cuaca membuat akses membaik dan memburuk secara cepat. Humanitarian Response Plan 2022 memperkirakan lebih dari 20 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2022). Skala kebutuhan itu melampaui kemampuan satu lembaga dan menuntut pembagian kerja lintas aktor.

Krisis juga memperlihatkan hubungan erat antara pangan dan gizi. Keterlambatan distribusi tidak hanya mengurangi konsumsi, tetapi meningkatkan risiko malnutrisi, terutama pada anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. UNICEF mencatat kebutuhan besar terhadap layanan terapeutik dan pasokan makanan siap pakai untuk anak dengan gizi buruk berat (United Nations Children’s Fund, 2022). Artinya, respons yang hanya mengirim bahan pangan tanpa rujukan gizi, air bersih, layanan

kesehatan, dan perlindungan tidak cukup untuk menahan kemerosotan kesejahteraan. (Gebretsadik et al., 2023).



Gambar 1. *Kondisi Krisis Pangan di Kawasan Tigray, Ethiopia*
Sumber: Al Jazeera dan World Food Programme (dokumentasi dalam skripsi).

WFP sebagai Instrumen

Sebagai instrumen, WFP menerjemahkan kontribusi sukarela donor dan mandat sistem PBB menjadi intervensi yang dapat dijalankan di Ethiopia. Country Strategic Plan 2020–2025 menyediakan kerangka yang menghubungkan prioritas nasional, tujuan pembangunan, dan respons darurat (World Food Programme, 2020). Dalam kerangka ini, dana donor digunakan untuk pengadaan pangan, transfer tunai, program gizi, gudang, transportasi darat, dan layanan udara kemanusiaan. Fungsi instrumen terlihat pada rantai yang relatif jelas: donor menyediakan sumber daya, WFP mengubahnya menjadi kapasitas program dan logistik, mitra melaksanakan distribusi, dan rumah tangga menerima bantuan. (Leiras et al., 2021).

Peran tersebut penting karena donor membutuhkan organisasi yang mampu bekerja dalam skala nasional dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. WFP memimpin Logistics Cluster, mengelola fasilitas penyimpanan, membantu transportasi, dan mendukung United Nations Humanitarian Air Service. Infrastruktur bersama ini memungkinkan organisasi kemanusiaan lain menggunakan kapasitas yang tidak mungkin dibangun sendiri dalam waktu singkat. Dengan demikian, WFP bukan sekadar saluran uang, tetapi instrumen operasional yang menggabungkan pembiayaan, standar, informasi, dan rantai pasok.

Akan tetapi, sifat sukarela pendanaan menciptakan ketergantungan. Kontribusi yang telah ditandai untuk tujuan tertentu mempersempit kemampuan organisasi memindahkan dana ke wilayah atau program yang paling mendesak. Kajian terhadap organisasi pangan dan pertanian menunjukkan bahwa earmarking dapat memengaruhi kinerja dengan membatasi fleksibilitas alokasi (Reinsberg,

2023). Upaya WFP memperluas basis donor juga menunjukkan bahwa mobilisasi sumber daya adalah proses politik dan diplomatik, bukan sekadar urusan administrasi (Lima, 2020). Jadi, fungsi instrumen memberi kapasitas besar, tetapi sekaligus membawa preferensi donor ke dalam ruang operasi.

Di Ethiopia, ketegangan ini tampak ketika kebutuhan berubah lebih cepat daripada arus pendanaan. WFP harus mempertahankan program pangan umum, perawatan malnutrisi, dukungan pengungsi, bantuan tunai, dan layanan logistik secara bersamaan. Ketika dana kurang atau terlambat, prioritas dipersempit dan nilai bantuan dapat turun. Artinya, keberhasilan WFP sebagai instrumen tidak hanya ditentukan oleh efisiensi internal, tetapi juga oleh kesediaan donor menyediakan dana yang cukup, tepat waktu, dan fleksibel. (Leiras et al., 2021)

WFP sebagai Arena

WFP juga berfungsi sebagai arena koordinasi. Bersama FAO, organisasi ini memimpin Food Security Cluster yang menyatukan pemerintah Ethiopia, lembaga PBB, donor, dan organisasi nonpemerintah. Forum tersebut digunakan untuk menyepakati peta kebutuhan, wilayah prioritas, pembagian peran, dan standar respons. WFP berfokus pada bantuan pangan dan logistik, sedangkan FAO mendukung produksi pertanian serta pemulihan mata pencaharian. Pembagian itu mencegah bantuan darurat terpisah dari upaya menjaga musim tanam dan aset ternak (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021). (Manaye et al., 2023).



Gambar 2. *Pendistribusian Pupuk dan Benih dari FAO di Tigray 2021*
Sumber: Food and Agriculture Organization of the United Nations dan Centre for Humanitarian Data (dokumentasi dalam skripsi).

Fungsi arena juga berjalan melalui Logistics Cluster. Pertemuan koordinasi mempertemukan pemilik kargo, pengelola gudang, penyedia transportasi, otoritas daerah, dan organisasi pelaksana untuk menyesuaikan rute serta jadwal. Data WFP tentang akses, stok, kebutuhan, dan kapasitas angkut menjadi dasar keputusan bersama. Dalam kondisi konflik, fungsi ini bersifat politis karena keputusan teknis seperti penggunaan koridor, prioritas kargo, dan izin perjalanan berhubungan

langsung dengan kontrol wilayah dan kedaulatan negara. Diplomasi kemanusiaan diperlukan agar ruang koordinasi tidak berhenti sebagai forum informasi, tetapi menghasilkan akses nyata (Geremedhn & Gebrihet, 2024).

Di bidang gizi, arena pangan berhubungan dengan mekanisme yang dipimpin UNICEF dan unit pemerintah Ethiopia. Rujukan antara titik distribusi pangan dan layanan pengobatan gizi membantu mencegah rumah tangga menerima paket yang terputus-putus. Untuk pengungsi, asesmen dan perencanaan bersama WFP dan UNHCR menghubungkan bantuan pangan dengan perlindungan serta data populasi. Evaluasi respons tingkat darurat di Ethiopia menunjukkan bahwa koordinasi antar-lembaga penting, tetapi kualitasnya bergantung pada kejelasan kepemimpinan, akses informasi, dan hubungan dengan institusi pemerintah (United Nations High Commissioner for Refugees, 2023).



Gambar 3. *Bantuan UNICEF dan ENCU dalam Memenuhi Kebutuhan Gizi Ibu dan Anak di Ethiopia*
Sumber: UNICEF dan ReliefWeb (dokumentasi dalam skripsi).

Sebagai arena, WFP tidak memiliki kewenangan memerintah semua peserta. Pengaruhnya lahir dari kepemilikan data, kapasitas logistik, mandat klaster, dan kemampuan menghubungkan keputusan dengan sumber daya. Kelebihan model ini adalah berkurangnya tumpang tindih serta terbentuknya gambaran operasi bersama. Kelemahannya, koordinasi dapat menjadi lambat ketika data tidak lengkap, kepentingan organisasi berbeda, atau pemerintah membatasi akses. Dengan kata lain, arena WFP efektif jika keputusan forum diikuti komitmen sumber daya dan izin operasional.

WFP sebagai Aktor Independen

Peran sebagai aktor independen terlihat pada kemampuan WFP menghasilkan asesmen, menyusun prioritas, menentukan kelompok sasaran, memilih modalitas bantuan, dan mengelola rantai pasok. Keputusan untuk menggunakan pangan fisik atau transfer tunai, misalnya, bergantung pada fungsi pasar, risiko inflasi, keamanan, dan ketersediaan barang. Ketika pasar tetap berfungsi, bantuan tunai dapat memberi pilihan kepada rumah tangga dan mendukung perdagangan lokal. Ketika pasokan terputus atau harga melonjak, pangan fisik lebih mampu menjamin konsumsi minimum. Keputusan semacam itu menggunakan pengetahuan teknis organisasi, bukan sekadar instruksi satu donor. (Arayaa & Lee, 2024).

Otonomi juga tampak pada penargetan. WFP menggabungkan analisis kerentanan, data konsumsi pangan, verifikasi komunitas, dan pendaftaran penerima untuk mengurangi duplikasi. Sistem ini dimaksudkan agar bantuan didasarkan pada kebutuhan, bukan afiliasi politik. Pada tingkat logistik, pra-penempatan stok, pemilihan gudang, dan perubahan rute mencerminkan diskresi profesional. Kapasitas tersebut memungkinkan organisasi merespons perubahan kondisi lebih cepat daripada jika setiap keputusan harus dinegosiasikan kembali dengan seluruh donor. (Leiras et al., 2021)

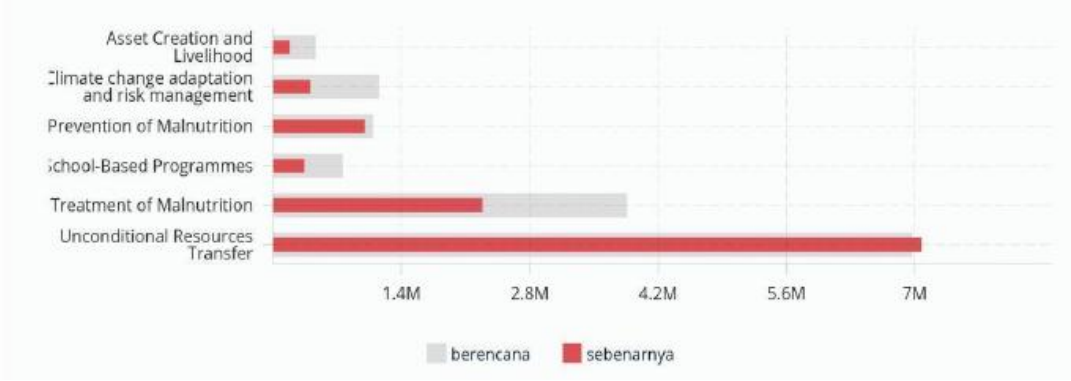
Namun, independensi WFP bersifat relatif. Organisasi tidak dapat memasuki wilayah tanpa persetujuan dan jaminan keamanan dari negara tuan rumah. Pada 2020–2022, akses ke Tigray, Amhara, dan Afar berubah mengikuti situasi konflik. WFP perlu bernegosiasi dengan otoritas nasional dan lokal agar konvoi, bahan bakar, serta personel dapat bergerak. Ketergantungan pada izin membuat prinsip kemanusiaan berhadapan dengan kedaulatan. Organisasi dapat menilai suatu wilayah sebagai prioritas, tetapi penilaian itu tidak otomatis membuka koridor bantuan.

Pendanaan juga membatasi otonomi. Keahlian teknis memungkinkan WFP menentukan apa yang perlu dilakukan, sedangkan struktur donor menentukan berapa banyak yang dapat dilakukan dan program mana yang memperoleh dana. Karena itu, istilah aktor independen tidak berarti bebas dari negara. Istilah tersebut lebih tepat dipahami sebagai kemampuan membuat keputusan berbasis mandat dan bukti dalam batas yang ditetapkan pendanaan, akses, keamanan, dan legitimasi politik. (Reinsberg, 2023; Inter-Agency Standing Committee, 2024)

Hasil Kemanusiaan

Capaian operasi meningkat tajam sepanjang periode penelitian. Pada 2020, WFP menjangkau sekitar 3,91 juta orang. Pada 2021, jangkauan naik menjadi 9,83 juta orang dengan distribusi sekitar

447.460 metrik ton pangan dan transfer tunai senilai USD 24,06 juta. Pada 2022, WFP menjangkau sekitar 10,2 juta orang; laporan sumber juga mencatat sekitar 304.000 metrik ton pangan darurat dan USD 33 juta bantuan tunai. Data tersebut menunjukkan kemampuan memperbesar operasi ketika kebutuhan meningkat (World Food Programme, 2021, 2022, 2023). (World Food Programme, 2021, 2022, 2023; World Food Programme, 2022)



Gambar 4. *Data Penerima Manfaat Berdasarkan Wilayah Program Tahun 2021*
Sumber: World Food Programme, Operations Report 2021 (dokumentasi dalam skripsi).

Tabel 1. *Capaian utama operasi WFP di Ethiopia, 2020–2022*

Tahun	Penerima manfaat	Bantuan pangan	Transfer tunai
2020	3,91 juta	177.000 metrik ton	Tidak dirinci dalam sumber ringkas
2021	9,83 juta	447.460 metrik ton	USD 24,06 juta
2022	Sekitar 10,2 juta	304.000 metrik ton	USD 33 juta

Sumber: diolah dari World Food Programme Annual Country Reports 2020, 2021, dan 2022.

Kenaikan jumlah penerima tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa krisis terselesaikan. Angka tersebut menunjukkan jangkauan, bukan perubahan kausal pada status ketahanan pangan. Bahkan pada 2022, kebutuhan masih sangat besar dan hambatan akses membuat sebagian populasi rentan belum terjangkau. Nilai bantuan juga tidak selalu memenuhi kebutuhan kalori minimum. Karena itu, capaian WFP paling tepat dipahami sebagai kontribusi untuk menahan kemerosotan, menjaga konsumsi dasar, dan mempertahankan layanan gizi di tengah krisis, bukan sebagai penyelesaian menyeluruh. (Tigistu & Hegena, 2022).

Hasil kemanusiaan mencakup lebih dari distribusi pangan. Bantuan tunai memungkinkan rumah tangga membeli sesuai kebutuhan ketika pasar berfungsi; intervensi nutrisi menghubungkan konsumsi dengan pengobatan malnutrisi; layanan logistik menjaga operasi mitra; dan dukungan informasi membantu penetapan prioritas. Kombinasi itu memperlihatkan bahwa keluaran WFP lahir

dari tiga peran sekaligus. Dana donor menyediakan sumber daya, arena koordinasi membagi pekerjaan, dan diskresi teknis mengubah sumber daya menjadi keputusan operasional.

Pembahasan

Otonomi Institusional dan Ketergantungan Donor

Temuan memperlihatkan paradoks institusional. Semakin besar kapasitas WFP, semakin besar pula ketergantungannya pada arus dana sukarela. Organisasi memiliki keahlian untuk mengenali kebutuhan, tetapi tidak memiliki sumber pendapatan tetap yang menjamin respons penuh. Dalam situasi krisis yang berubah cepat, dana terikat dapat tertinggal dari kebutuhan lapangan. WFP lalu harus melakukan advokasi, diplomasi donor, dan penyesuaian program. Di titik ini, peran aktor independen dan instrumen beririsan: organisasi merumuskan kebutuhan sendiri, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada pilihan negara donor.

Ketergantungan tersebut tidak otomatis menghapus otonomi. Birokrasi WFP masih memilih metode asesmen, menetapkan standar, dan mengelola operasi. Namun, otonomi itu berlapis. Otonomi teknis relatif kuat, otonomi finansial lebih lemah, sedangkan otonomi politik bergantung pada akses dan legitimasi. Pembedaan ini membantu menghindari dua kesimpulan ekstrem, yaitu menganggap WFP sepenuhnya dikendalikan donor atau sepenuhnya bebas sebagai aktor supranasional.

Netralitas Kemanusiaan dan Kedaulatan Negara

Konflik Ethiopia memperlihatkan bahwa akses adalah hasil negosiasi. WFP harus menjaga bantuan berdasarkan kebutuhan, tetapi bekerja dalam yurisdiksi pemerintah Ethiopia. Pemerintah memiliki hak mengatur perbatasan, keamanan, dan kegiatan lembaga asing, sedangkan WFP memiliki mandat melindungi prinsip kemanusiaan. Ketika izin, bahan bakar, atau koridor tertahan, ketegangan antara kedua kepentingan itu menjadi nyata. Diplomasi kemanusiaan kemudian menjadi bagian inti operasi, bukan kegiatan tambahan. (Abay et al., 2022; Inter-Agency Standing Committee, 2024)

Risiko politisasi muncul dari semua arah. Pemerintah atau kelompok bersenjata dapat memandang bantuan sebagai sumber daya strategis, donor dapat menghubungkan pendanaan dengan prioritas kebijakan, dan organisasi pelaksana dapat bergantung pada data atau struktur lokal yang tidak netral. WFP merespons melalui asesmen, verifikasi penerima, pemantauan distribusi, dan mekanisme keluhan. Kendati demikian, prosedur teknis tidak sepenuhnya menghilangkan tekanan politik. Independensi perlu terus dibuktikan melalui transparansi keputusan dan kemampuan mengoreksi salah sasaran.

Respons Darurat dan Ketahanan Pangan Jangka Panjang

Bantuan WFP efektif untuk menutup kesenjangan konsumsi akut, tetapi tidak otomatis memperbaiki penyebab struktural. Rumah tangga tetap rentan jika lahan rusak, ternak mati, pasar tidak pulih, dan layanan publik melemah. Karena itu, bantuan pangan perlu terhubung dengan dukungan benih, kesehatan ternak, pemulihan mata pencaharian, perlindungan sosial, dan adaptasi iklim. Kerja sama WFP dan FAO menunjukkan arah tersebut: bantuan konsumsi menjaga rumah tangga bertahan saat ini, sedangkan dukungan produksi memperbesar kemampuan menyediakan pangan pada musim berikutnya. (Food Security Information Network & Global Network Against Food Crises, 2023; World Food Programme, 2022b) (Weldemariam et al., 2023).

Perbedaan horizon waktu menimbulkan pilihan sulit. Menyimpan dana untuk program ketahanan ketika kebutuhan akut belum terpenuhi dapat mengorbankan kehidupan, tetapi menghabiskan seluruh sumber daya untuk distribusi berulang dapat mempertahankan ketergantungan. Jalan yang lebih rasional adalah desain berlapis: bantuan tanpa syarat bagi rumah tangga dalam kondisi akut, dukungan gizi bagi kelompok berisiko, bantuan tunai ketika pasar berfungsi, serta pemulihan aset dan produksi ketika keamanan memungkinkan. WFP memiliki posisi untuk menghubungkan lapisan tersebut, tetapi keberhasilannya memerlukan komitmen pemerintah dan donor yang melampaui siklus pendanaan darurat.

SIMPULAN

WFP menjalankan peran multidimensional dalam menangani krisis pangan Ethiopia pada 2020–2022. Sebagai instrumen, WFP mengubah kontribusi donor dan mandat PBB menjadi bantuan pangan, tunai, gizi, serta layanan logistik. Sebagai arena, WFP mempertemukan pemerintah Ethiopia, lembaga PBB, donor, dan organisasi nonpemerintah untuk menyelaraskan data, prioritas, rute, dan pembagian kerja. Sebagai aktor independen, WFP menggunakan kapasitas profesionalnya untuk melakukan asesmen, memilih sasaran dan modalitas, serta mengelola rantai pasok. Ketiga peran itu menjelaskan bagaimana WFP mampu meningkatkan jangkauan dari 3,91 juta penerima pada 2020 menjadi sekitar 10,2 juta pada 2022.

Namun, independensinya tidak mutlak. Pendanaan sukarela dan dana terikat membatasi fleksibilitas, sementara izin akses, risiko keamanan, dan kedaulatan negara membatasi operasi. Kontribusi WFP penting untuk mencegah kemerosotan yang lebih parah, tetapi angka jangkauan tidak membuktikan bahwa penyebab struktural krisis telah selesai. Respons selanjutnya perlu menggabungkan bantuan akut dengan pemulihan pasar, mata pencaharian, pertanian, perlindungan

sosial, dan adaptasi iklim. Secara analitis, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan organisasi internasional tidak hanya ditentukan oleh jumlah program, melainkan oleh kemampuannya menyeimbangkan fungsi instrumen, arena, dan otonomi profesional dalam batas politik yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Abay, K. A., Abay, M. H., Berhane, G., Chamberlin, J., Croke, K., & Tafere, K. (2022). Access to health services, food, and water during an active conflict: Evidence from Ethiopia. PLOS Global Public Health, 2(11), e0001015. https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0001015

Anderson, W., Seager, R., Baethgen, W., & Cane, M. (2023). Multiyear La Niña Events and Multiseason Drought in the Horn of Africa. Journal of Hydrometeorology, 24(1), 119–132. https://doi.org/10.1175/JHM-D-22-0043.1

Arayaa, T. A., & Lee, S.-K. (2024). Conflict and households' acute food insecurity: Evidences from the ongoing war in Tigrai-Northern Ethiopia. Cogent Public Health, 11(1), 2331844. https://doi.org/10.1080/27707571.2024.2331844

Archer, C. (2001). International Organizations (3rd ed.). Routledge.

Burki, T. (2022). Humanitarian crisis in Tigray amidst civil war. The Lancet Infectious Diseases, 22(6), 774–775. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00304-8

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2021). Northern Ethiopia Situation Overview November 2021. FAO. https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/27ed2104-23a1-4d80-88f9-e3daa605415b/content

Food Security Information Network, & Global Network Against Food Crises. (2023). Global Report on Food Crises 2023. FSIN.

Gebretsadik, G. G., Abraha, M., Bereket, T., Hailemariam, F., Gebrearegay, F., Hagos, T., Assefa, M., Berhe, K., Gebregziabher, H., Adhanu, A. K., Haileselassie, M., Gebregziabher, M., & Mulugeta, A. (2023). Prevalence and multi-level factors associated with acute malnutrition among children aged 6–59 months from war affected communities of Tigray, Northern Ethiopia, 2021: A cross-sectional study. Conflict and Health, 17, 10. https://doi.org/10.1186/s13031-023-00508-x

Geremedhn, M. A., & Gebrihet, H. G. (2024). The Dynamics of Humanitarian Diplomacy During Wartime: Insights from Tigray Crisis in Ethiopia. Social Sciences, 13(11). https://doi.org/10.3390/socsci13110626

Hakiki, F. (2020). Analisis Dampak Krisis Pangan terhadap Human Security di Etiopia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 16(2), 129–144. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/3476

Hirvonen, K., de Brauw, A., & Abate, G. T. (2021). Food Consumption and Food Security during the COVID-19 Pandemic in Addis Ababa. American Journal of Agricultural Economics, 103(3),

772–789. https://doi.org/10.1111/ajae.12206

Hirvonen, K., Minten, B., Mohammed, B., & Tamru, S. (2021). Food prices and marketing margins during the COVID-19 pandemic: Evidence from vegetable value chains in Ethiopia. Agricultural Economics, 52(3), 407–421. https://doi.org/10.1111/agec.12626

Integrated Food Security Phase Classification. (2021). Ethiopia Acute Food Insecurity Analysis, October 2020-September 2021. IPC Global Partnership. https://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/IPC_Ethiopia_Acute_Food_Insecurity_2020Oct2021Sept_Snapshot.pdf

Inter-Agency Standing Committee. (2024). Inter-Agency Humanitarian Evaluation of the Response to the Humanitarian Crisis in Northern Ethiopia. IASC.

Leiras, A., Gonçalves, P., Chawaguta, B., de Brito Junior, I., & Yoshizaki, H. T. Y. (2021). Food aid supply and distribution in insecure regions: World Food Programme operation analysis in Ethiopia. Production, 31, e20210070. https://doi.org/10.1590/0103-6513.20210070

Lima, T. (2020). Enlarging the Donor Base: An Analysis of the World Food Programme's Reform Process and the Brazilian Bridge Diplomacy. Revista Brasileira de Política Internacional, 63(2), e003. https://doi.org/10.1590/0034-7329202000203

Manaye, A., Afewerk, A., Manjur, B., & Solomon, N. (2023). The effect of the war on smallholder agriculture in Tigray, Northern Ethiopia. Cogent Food & Agriculture, 9(1), 2247696. https://doi.org/10.1080/23311932.2023.2247696

McCann, J., Amare, M., & Mekonnen, D. (2023). COVID-19 Disruptions of Food Systems and Nutrition Services in Ethiopia: Evidence of the Impacts and Policy Responses. Annals of Global Health, 89(1), 34. https://doi.org/10.5334/aogh.3980

Mulugeta, A., & Gebregziabher, M. (2022). Saving children from man-made acute malnutrition in Tigray, Ethiopia: A call to action. The Lancet Global Health, 10(4), e469–e470. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00023-7

Reinsberg, B. (2023). Earmarked Funding and the Performance of International Organizations: Evidence from Food and Agricultural Development Agencies. Global Studies Quarterly, 3(4). https://doi.org/10.1093/isagsq/ksad056

Rumbia, N. A., Baadila, E., & Rehatta, V. J. (2022). Fungsi World Food Programme dalam Penanganan Krisis Pangan di Negara Berkonflik. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(8), 873–878. https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/1426

Tigistu, S., & Hegena, B. (2022). Determinants of food insecurity in food aid receiving communities in Ethiopia. Journal of Agriculture and Food Research, 10, 100391. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100391

United Nations Children's Fund. (2022). Ethiopia Humanitarian Situation Report No. 8, August 2022. UNICEF. https://www.unicef.org/media/128651/file/Ethiopia-Humanitarian-SitRep-August-2022.pdf

United Nations High Commissioner for Refugees. (2023). Evaluation of UNHCR's Response to the L3 Emergency in Ethiopia 2021-2022. UNHCR. https://www.unhcr.org/sites/default/files/2023-07/evaluation-report-l3-emergency-ethiopia-2021-2022.pdf

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. (2022). Ethiopia Humanitarian Response Plan 2022. United Nations. https://www.unocha.org/publications/report/ethiopia/ethiopia-humanitarian-response-plan-2022-july-2022

Weldegiargis, A. W., Abebe, H. T., Abraha, H. E., Abrha, M. M., Tesfay, T. B., Belay, R. E., Araya, A. A., Gebregziabher, M. B., Godefay, H., & Mulugeta, A. (2023). Armed conflict and household food insecurity: Evidence from war-torn Tigray, Ethiopia. Conflict and Health, 17, 22. https://doi.org/10.1186/s13031-023-00520-1

Weldemariam, L. F., Sakdapolrak, P., & Ayanlade, A. (2023). Household food-security strategies and migration in Tigray, Northern Ethiopia. Scientific African, 21, e01801. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01801

World Food Programme. (2020). Ethiopia Country Strategic Plan 2020-2025. World Food Programme. https://www.wfp.org/operations/et02-ethiopia-country-strategic-plan-2020-2025

World Food Programme. (2021). Ethiopia Annual Country Report 2020. World Food Programme. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=ET02&year=2020

World Food Programme. (2022). Ethiopia Annual Country Report 2021. World Food Programme. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=ET02&year=2021

World Food Programme. (2022a). Tigray: Emergency Food Security Assessment. World Food Programme.

World Food Programme. (2022b). Regional Drought Response Plan for the Horn of Africa May–December 2022. World Food Programme.

World Food Programme. (2023). Ethiopia Annual Country Report 2022. World Food Programme. https://www.wfp.org/operations/annual-country-report?operation_id=ET02&year=2022